



**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
PREDIKSI BELANJA MODAL PEMERINTAH
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

PANDI ALANDA
NPM 1415100072

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PANDI ALANDA
NPM : 1415100072
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI
BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI
SUMATERA UTARA

MEDAN, JULI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(ANGGI PRATAMA NST, SE., M. Si)

PEMBIMBING I

(OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYA NITA SH, M.Hum)

PEMBIMBING II



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : PANDI ALANDA
NPM : 1415100072
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI
BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI
SUMATERA UTARA

MEDAN, JULI 2019



KETUA

ANGGI PRATAMA NST, SE., M.Si

ANGGOTA I

(OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(HERIYATI CHRISNA, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Drs MULKANUDDIN RITONGA, MM.,Ak)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : PANDI ALANDA
NPM : 1415100072
Fakultas-program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
PREDIKSI BELANJA MODAL PEMERINTAH
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2019


(Pandi Alanda)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pandi Alanda
Tempat/Tanggal lahir : Kota Pinang, 05 Oktober 1995
NPM : 1415100072
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Dsn IV S.Batu Perum Deli Kencana Blok F No.23A

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2019

Yang membuat pernyataan



(Pandi Alanda)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI


yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: PANDI ALANDA
Tempat/Tgl. Lahir	: KOTA PINANG / 05 Oktober 1995
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1415100072
Program Studi	: Akuntansi
Konentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Persentase Kredit yang telah dicapai	: 140 SKS, IPK 3.22

ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
PENGARUH TINDAKAN SUPERVISI TERHADAP KEPUASAN KERJA AKUNTAN PEMULA DI PEMKO BINJAI	<input type="checkbox"/>
ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL KOTA BINJAI.	<input checked="" type="checkbox"/>
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMKO BINJAI.	<input type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi dibenarkan tanda


 Rektor I.
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

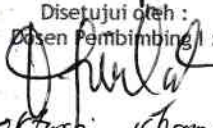
Medan, 27 Agustus 2018

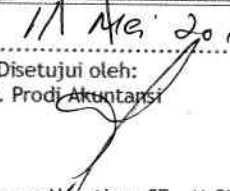
Pemohon,

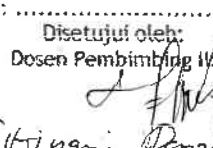

 (Pandi Alanda)


 Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 05-07-2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:

 (Orlani (Chamilah), S.P., S.E., M.P.)

Tanggal : 11 Mei 2018
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Fitriyani Penggabean, S.E., M.P.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
 Email : fasosa@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

a hari ini, Sabtu... Tanggal, 13.. Bulan, ... Juli..... Tahun, 2019....., telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi AKUNTANSI..... Semester I Tahun Akademik2019..... bagi mahasiswa/i atas nama :

Nama : Pandi Alanda
 Npm : 1415100072
 Program Studi : Akuntansi
 Tanggal Ujian : 13 Juli 2019
 Judul Skripsi Lama : ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL KOTA BINJAI
 Judul Skripsi Baru : ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL PEMERINTAHAN KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

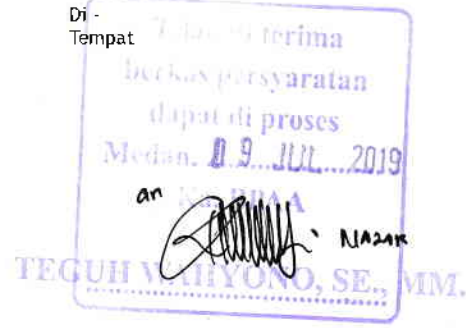
NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	ANGGI PRATAMA NST, SE., M.Si	
2	Anggota I/ Pembimbing I	OKTARINI KHAMILAH SRG, SE., M.Si	
3	Anggota II/ Pembimbing II	FITRI YANI RAUGGABEAN, SE., M.Si	
4	Anggota III/ Penguji I	HERIYATI CHRISMA, SE., M.Si	
5	Anggota IV/ Penguji II	Drs. MULKANUDDIN RITOWGA, MM., AK	



FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Juli 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANDI ALANDA
 Tempat/Tgl. Lahir : Kota Pinang / 05 OKTOBER 1995
 Nama Orang Tua : SARIADI
 N. P. M : 1415100072
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082367654772
 Alamat : Medan Kota

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA BINJAI, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA ditegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	Rp.	0
Total Biaya	Rp.	2.250.000
5. Uk. Termin Genap	Rp.	1.200.000
		3.450.000

7/19
 0/7
 DTA

Ukuran Toga : M



Hormat saya
 PANDI ALANDA
 1415100072

Halaman :

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga). untuk - Fakultas - untuk BPAA (astji) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

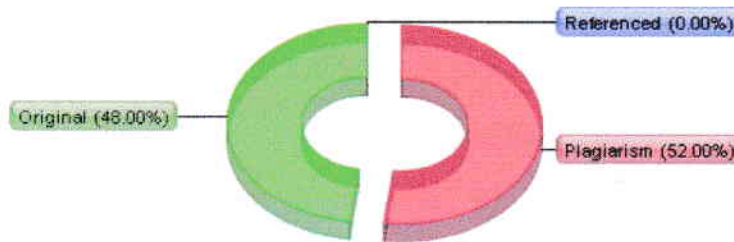
Analyzed document: 08/07/2019 13:27:48

"PANDI ALANDA_1415100072_Akuntansi.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

23	wrds: 3829	https://independent.academia.edu/pembantu111
23	wrds: 2368	http://eprints.undip.ac.id/22597/1/SKRIPSI_-_NUR_INDAH_RAHMAWATI.PDF
19	wrds: 1763	http://digilib.uinsby.ac.id/30229/4/Dedy%20Kusbandi_B94214066.pdf

other Sources:]

Processed resources details:

238 - Ok / 44 - Failed

other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls: -



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oksarini, Hamilah, S.P., SE., M.Si.
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani, Penggabean, SE., M.Si.
 Nama Mahasiswa : PANDI ALANDA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100072
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Dana Monev (Umum C.PAU) Dan Pendapatan Akr. Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintahan Kota Banggai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
7-2018	Perbaiki isi Bab 1 (identifikasi dan latar belakang masalah), Bab 2 (kerangka konseptual) dan Bab 3 (Populasi & sampel, Teknik analisa data)		
7-2018	Perbaiki latar belakang masalah, hipotesis, definisi operasional dan daftar pustaka serta cover		
8-2018	Perbaiki latar belakang masalah dan kerangka konseptual - Acr of seminar proposal		

Medan, 12 Juli 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Doktor, ai. khamilah, Srg, SE, M.Si.....
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani Panggabean, SE, M.Si.....
 Nama Mahasiswa : PANDI ALANDA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100072
 Bidang Pendidikan : Statistika (C.S.17)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENGARUH DANA AWAKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL PEMERINTAHAN KOTA/KABUPATEN DI SUMATRA UTARA.....

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3-19	Perbaiki Abstrak, Kata pengantar, tabel waktu penelitian dan tabel peneliti terdahulu, Hasil penelitian y/ perkembangan Variabel DAU, PAD dan DAU dijelaskan serta pembahasan dijelaskan y/ simulasi dan banding kan dan peneliti terdahulu dan teori	<i>[Signature]</i>	
3-19	Perbaiki dan perbagian latar belakang masalah, kerangka konseptual, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka Acc y/ Sidang Meja Hijau	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing I
[Signature]
 Fitriani Khamilah Srg, SE, M.Si

Medan, 25 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,
[Signature]
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarina, Khamilah, S.S., S.P., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani, Penggabean, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : PANDI ALANDA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100072
 Bidang Pendidikan : S1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintahan Kota Binjai

TANGGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10 - 2018	- cover - Sistematika penelitian tentang Bel Kata pengantar - Daftar isi - Daftar tabel - Daftar Gambar - T. Operasionalisasi - T. Skedul p-p - T. Keppig RS - Referensi yg diperbari tahun 2008 (estata) - Daftar pustaka (Sesuai abjad) - Sampul belakang		
10 - 2018	- cover - installasi awal - Referensi 2008 - Surat / Skedul p-p - Operasional p - Kepp. p. s - Daftar tabel, Gambar, dan - Daftar pustaka - Undays yg dipant - Simbol gambar du.		

Medan, 25 Juli 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,


 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 INDONESIA
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 FAKULTAS SOSIAL SAINS




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Oktarina Khamilah SRG, SE, M.Si.....
 Pembimbing II : Fitri Nani Panggabean, SE, M.Si.....
 Mahasiswa : PANDI ALANDA
 Program Studi : Akuntansi
 NPM / Pokok Mahasiswa : 1415100072
 Pendidikan : Strata satu, S.1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Para Aktor Umum (CPAD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.....

NO	KELOMPOK	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10.6	2019	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - Halaman persembahkan - Abstrak B. Indonesia / K. Inggris - Daftar isi - Kata pengantar - Kesimpulan sementara dan Rumusan / judul (amend) - Sampul (debetale untuk sampul) - Peramaan Kertas Kertas - Pembahasan - Kesimpulan & saran - Daftar pustaka 		

Medan, 25 Mei 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,


 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Doktorini Khamilah S.S.B. SE. M.Si.
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yoni Punggabean SE. M.Si.
 Nama Mahasiswa : PANDI ALANDA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100072
 Tingkat Pendidikan : Strata satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Pola Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
01/07 2019	- Pembahasan Resume Regulasi - Daftar pustaka - Refrasi Terbitan 2019 (cetak)		
	Ace sedang skripsi 02/07 -2019 bpi		

Medan, 27 Juni 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khumalah, S.Si, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Fitriyanti, S.Pd, S.Pi, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : PANDI ALANDA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100072
 Bidang Pendidikan : S.1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintahan Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11/11 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Sistematika penulisan - Sampul - Kata Pengantar - Operasional - Daftar Pustaka - Revisi yg diperlukan - Orisinalitas penulisan <p>File Sewang Proposal</p> <p><i>[Signature]</i> 17/11/2018</p>	<i>[Signature]</i>	

Medan, 17 November 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



DE Surya Nita S.H., M.Hum.

Acc belany skripsi
02/07
2019
by I



**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
PREDIKSI BELANJA MODAL PEMERINTAH
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

PANDI ALANDA
NPM 1415100072

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
M E D A N
2019**



Acc & sidang
Mega Hidayat
Pandi Alanda 30/3/19

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
PREDIKSI BELANJA MODAL PEMERINTAH
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Oleh :

**PANDI ALANDA
NPM 1415100072**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
M E D A N
2019**

Acc & jilid buku
Pandi Alanda
18/7 - 2019



**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
PREDIKSI BELANJA MODAL PEMERINTAH
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

PANDI ALANDA
NPM 1415100072

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
M E D A N
2019**

Rec. Jibe 100
Filey 23/4/2019



**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
PREDIKSI BELANJA MODAL PEMERINTAH
KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

PANDI ALANDA
NPM 1415100072

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
M E D A N
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara serta apakah terjadi *Flypaper Effect* di Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Data yang bersumber dari data sekunder yaitu dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2014 sampai 2018. Hasil dari penelitian ini, pertama menunjukkan bahwa dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Terjadi *Flypaper Effect* di Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Hasil perhitungan uji R^2 ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 96,7%, sedangkan sisanya sebesar 3,3% (100% - 96,7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,967 yang artinya 96,7% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti silfa, dana alokasi khusus dan lain-lain.

Kata Kunci: DAU, PAD, Belanja Modal dan *Flypaper Effect*

ABSTRACT

This study aims to determine whether General Allocation Funds and Regional Original Revenues simultaneously affect the capital expenditure of the Regency Government / City in North Sumatra and whether there is a Flypaper Effect in the Regency Government / City in North Sumatra. This research uses quantitative. Data sourced from secondary data is the document of the Realization of Regional Expenditure Budget 2014 to 2018. The results of this study, first, show that the General Allocation funds partially have a significant effect on the capital expenditure of the Regency Government / City in North Sumatra. Regional Original Income partially has a significant effect on capital expenditure of the Regency Government / City in North Sumatra. General Allocation Funds and Regional Original Income simultaneously have a significant effect on capital expenditure of the Regency Government / City in North Sumatra. Flypaper Effect occurs in the Regency Government / City in North Sumatra. The results of the R² test calculation mean that the ability of the independent variable to explain the variation in the dependent variable is 96.7%, while the remaining 3.3% (100% - 96.7%) is explained by other factors outside the regression model analyzed . Adjusted R Square value is 0.967, which means that 96.7% of the influence of independent variables on the dependent variable can be explained by variables in this study and the remainder is explained by other non-researched variables such as silfa, special allocation funds and others.

Keywords : DAU, PAD, Capital Expenditures and Flypaper Effect

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	14
1. Dana Alokasi Umum (DAU)	14
2. Pendapatan Asli Daerah.....	16
3. Belanja Modal.....	19
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Definisi Operasional Variabel.....	34
D. Populasi dan Sampel	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Pengujian Hipotesis	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
1. Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara.....	42
2. Deskripsi Variabel	43

	3. Pengujian Asumsi Klasik.....	45
	4. Regresi Linier Berganda	49
	5. Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>)	50
	B. Pembahasan.....	53
	1. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	53
	2. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	54
	3. Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	55
	4. Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Modal	56
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	58
	B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014 sampai 2018	3
Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2014 sampai 2018	4
Tabel 1.3 Jumlah Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2014 sampai 2018	4
Tabel 1.4 Originalitas Penelitian.....	12
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	34
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 3.3 Daftar Populasi dan Sampel.....	36
Tabel 4.1 Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.....	43
Tabel 4.2 Perkembangan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.....	44
Tabel 4.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sumatera Utara	44
Tabel 4.4 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	48
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda	50
Tabel 4.8 Uji Simultan	51
Tabel 4.9 Uji Parsial.....	51
Tabel 4.10 Uji Determinasi	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	46
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	47

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Sariadi dan Ibunda Nur Aisah serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada seluruh keluargaku yaitu Yulia Irma Ananda, Reza Aditya, Adinda Salwa Nabila terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
8. Kepada teman-temanku Ade Surya, Irfansyah, Putra Yanda, Syahyono Sobri dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Kepada teman-teman terdekatku di kampus yaitu Zulham Alimahua, Afdilah Dwi Subowo, Muhammad Fadli dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Juli 2019
Penulis

Pandi Alanda
1415100072

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang otonomi daerah yaitu paket Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjaditantang dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pemda berhak menggunakan pendapatan yang dimiliki baik itu yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) dan lain-lain. pendapatan daerah yang sah untuk merealisasikan sejumlah belanja daerah dalam bentuk belanja modal.

Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk menutupi kebutuhan *fiscal* daerah yang sepenuhnya belum mampu di biayai oleh pendapatan asli daerah. Adam *et al.*, (2013) “Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat menjadi sumber pendanaan utama untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah”. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan bertujuan

untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan adanya otonomi daerah, seluruh pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber-sumber daya di daerahnya untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing untuk membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal yaitu belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dana akan menambah kekayaan atau asset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses yaitu lelang atau tender. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota Sumatera Utara
Tahun 2014-2018

No	Nama Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (Jutaan)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Asahan	628,975	733,672	795,351	795,351	891,150
2	Kab. Dairi	451,176	512,477	532,723	560,602	623,702
3	Kab. Deli Serdang	1,100,014	1,260,755	1,363,811	1,500,192	1,494,821
4	Kab. Langkat	847,503	982,658	1,039,651	1,039,651	1,200,481
5	Kab. Mandailing Natal	541,107	625,543	692,134	722,942	788,477
6	Kab. Simalungun	865,406	977,809	1,077,986	1,425,601	1,230,816
7	Kab. Tapanuli Selatan	454,322	517,343	572,098	592,764	654,669
8	Kab. Tapanuli Utara	487,346	1,104,926	596,841	616,216	650,827
9	Kab. Toba Samosir	387,623	423,292	495,377	506,844	537,941
10	Kota Medan	1,153,789	1,270,245	1,393,505	1,528,725	1,611,941
11	Kota PematangSiantar	429,632	492,115	519,436	536,792	593,533
12	Kota Sibolga	292,873	338,507	371,813	380,075	412,806
13	Kota TebingTinggi	307,636	368,587	385,030	400,237	432,437
14	Kab. Humbang Hasundutan	376,847	440,920	486,880	511,805	533,185
15	Kab. Samosir	331,413	384,761	441,619	447,471	459,550
Total		8,655,661	10,433,611	10,764,255	11,565,268	12,116,336

Sumber : [http://www.djpk.depkeu.go.id/\(2019\)](http://www.djpk.depkeu.go.id/(2019))

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa meningkatnya dana alokasi umum pada tahun 2014 sebesar 8.655.661 sampai tahun 2018 sebesar 12.116.336, seluruh pemerintah daerah mengalami peningkatan dalam penerimaan jumlah Dana Alokasi Umum, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan terhadap dana alokasi umum. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai pemerintah daerah tersebut, disebabkan peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan, karena Belanja Daerah lebih didominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal.

Tabel 1.2
Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara
Tahun 2014-2018

No	Nama Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (Jutaan)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Asahan	37,895	53,692	91,468	98,279	52,170
2	Kab. Dairi	20,912	29,933	53,526	58,792	68,003
3	Kab. Deli Serdang	291,018	328,348	433,886	515,294	573,010
4	Kab. Langkat	129,243	65,521	107,812	122,715	132,673
5	Kab. Mandailing Natal	21,274	47,666	37,966	63,847	70,406
6	Kab. Simalungun	61,246	97,915	96,390	111,893	132,561
7	Kab. Tapanuli Selatan	56,418	69,220	95,588	109,349	76,641
8	Kab. Tapanuli Utara	34,023	75,909	63,696	82,754	94,783
9	Kab. Toba Samosir	16,543	19,803	26,014	30,953	54,391
10	Kota Medan	1,147,124	1,206,170	1,384,246	1,489,723	1,535,310
11	Kota PematangSiantar	49,915	61,358	90,477	95,558	101,583
12	Kota Sibolga	26,698	29,458	52,923	60,487	68,538
13	Kota TebingTinggi	47,331	53,200	74,515	82,410	94,058
14	Kab. HumbangHasundutan	17,902	17,633	29,491	35,238	42,097
15	Kab. Samosir	17,460	26,661	36,850	34,297	39,268
Total		1,975,001	2,182,487	2,674,849	2,591,590	3,135,493

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/> (2019)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa adanya penurunan pendapatan asli daerah pada tahun 2017 sebesar 2.591.590 dari tahun sebelumnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengelola potensi yang ada di suatu daerah seperti pajak, retribusi daerah dan lain-lain.

Tabel 1.3
Jumlah Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Utara
Tahun 2014-2018

No	Nama Pemerintah Daerah	Belanja Modal (Jutaan)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Asahan	1,037,634	1,143,614	1,388,136	1,241,829	1,501,955
2	Kab. Dairi	593,188	694,247	745,529	864,134	993,346
3	Kab. Deli Serdang	1,801,287	2,005,506	2,361,728	3,260,500	3,005,435
4	Kab. Langkat	1,329,229	1,536,812	1,605,301	1,615,158	2,287,200
5	Kab. Mandailing Natal	765,110	850,556	972,739	1,144,944	1,495,777
6	Kab. Simalungun	1,378,043	1,432,131	1,648,279	2,109,777	2,185,035
7	Kab. Tapanuli Selatan	676,128	842,846	862,248	1,093,721	1,176,894
8	Kab. Tapanuli Utara	737,700	1,668,769	816,538	1,003,988	1,251,194
9	Kab. Toba Samosir	619,897	770,736	770,865	805,673	1,010,632
10	Kota Medan	3,021,172	3,224,449	3,723,643	4,878,166	4,525,231
11	Kota PematangSiantar	639,607	741,073	774,366	1,007,049	940,141
12	Kota Sibolga	414,041	450,894	521,086	642,489	689,678
13	Kota TebingTinggi	479,585	584,572	614,015	651,371	760,703
14	Kab. Humbang Hasundutan	511,538	605,790	700,845	754,044	881,820
15	Kab. Samosir	400,831	506,372	552,483	660,281	810,390
Total		14,404,989	17,058,369	18,057,802	21,733,122	23,515,432

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/> (2019)

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa adanya peningkatan belanja modal pada tahun 2014 sebesar 14.404.989 sampai tahun 2018 sebesar 23.515.432, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah modal terlalu besar mengeluarkan belanja daerah.

Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Pengeluaran pemerintah berperan untuk membiayai pelayanan publik yang pada akhirnya akan memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Dalam APBD, belanja dikelompokkan menjadi : 1. Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 2. Belanja Langsung yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Pemerintah daerah mengeluarkan uang untuk membayar biaya-biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Kebutuhan biaya ini disebut belanja daerah. Secara definisi, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah pada masa yang akan datang (Abdullah, 2018).

Abdullah (2018) menyatakan bahwa “Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja juga diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip dan komunikasi dan informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Klasifikasi belanja juga dibuat menurut fungsi yang tujuannya adalah untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan

fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Namun demikian dalam penyusunan APBD, klasifikasi belanja dibuat menurut kelompok, yaitu (1) belanja tidak langsung dan (2) belanja langsung”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tetap tak berwujud. Belanja modal memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan memiliki daya ungkit dalam membangkitkan perekonomian suatu daerah. Belanja modal digunakan untuk membiayai segala kebutuhan masyarakat daerah akan fasilitas, sarana dan prasarana public dan pembangunan infrastruktur daerah yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan iklim investasi di daerah. Belanja modal digunakan pemerintah daerah untuk pemenuhan dan penambahan aset tetap yang dapat mendukung dan memperlancar tugas pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang memadai. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana mendasari besarnya anggaran belanja modal yang dialokasikan. Sarana dan prasarana yang ini dibutuhkan untuk kelancaran tugas pemerintahan untuk melayani masyarakat maupun untuk menyediakan fasilitas-fasilitas publik.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat betapa pentingnya peranan belanja modal, tetapi peran penting belanja modal ini seringkali tidak diimbangi dengan pengalokasian belanja modal yang memadai di daerah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Meningkatnya dana alokasi umum pada tahun 2014 sebesar 8.655.661 sampai tahun 2018 sebesar 12.116.336, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ketergantungan terhadap dana alokasi umum.
- b. Menurunnya pendapatan asli daerah pada tahun 2017 sebesar 2.591.590 dari tahun sebelumnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengelola potensi yang ada di suatu daerah.

- c. Meningkatnya belanja modal pada tahun 2014 sebesar 14.404.989 sampai tahun 2018 sebesar 23.515.432, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu besar mengeluarkan belanja modal.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari ketidakjelasan dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka penulis merumus kan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara?
3. Apakah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara?
4. Apakah terjadi *Flypaper Effect* di pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- d. Untuk mengetahui apakah terjadi *Flypaper Effect* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan mengenai DAU, PAD dan Belanja Modal.

b. Bagi Lembaga Yang Diteliti

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan informasi dan pertimbangan dalam evaluasi terhadap perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai referensi untuk penelitian sektor publik selanjutnya terkhusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan DAU, PAD dan Belanja Modal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wandira (2013) mengenai Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi se Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultanvariabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 1.4 Originalitas Penelitian

No.	Keterangan	Peneliti Terdahulu	Peneliti Sekarang
1	Lokasi Penelitian	Pemerintah Provinsi se Indonesia	Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara
2	Tahun Penelitian	2013	2019
3	Data Penelitian	2012	2014-2018
4	Variabel yang diteliti	Belanja Modal (Y) Pendapatan Asli Daerah (X ₁) Dana Alokasi Umum (X ₂) Dana Alokasi Khusus (X ₃) Dana Bagi Hasil (X ₄)	Belanja Daerah (Y) Dana Alokasi Umum (X ₁) Pendapatan Asli Daerah (X ₂)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat dilihat adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain yaitu:

1. Lokasi Penelitian : Peneliti terdahulu dilakukan di Pemerintah Provinsi se Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
2. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2013 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
3. Data Penelitian : Penelitian terdahulu hanya menggunakan data tahun 2012 sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
4. Variabel yang diteliti : Penelitian terdahulu menggunakan variabel 1 variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y), dan 4 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), Dana

Alokasi Khusus (X_3), dan Dana Bagi Hasil (X_4). Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan penelitian pada variabel Belanja Modal (Y), dan 2 variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2).

Perbedaan-perbedaan lokasi penelitian, waktu penelitian, data penelitian dan fokus variabel yang diteliti menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan khusus dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 29 Proporsi DAU antar daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkanimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berkaitan dengan hubungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah serta merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain kepada publik (Kusumawardani, 2018).

Panggabean, FY (2017) “Dana transfer bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dalam memastikan pencapaian standar pelayanan publik minimum di seluruh wilayah, dalam proses pencapaian daerah yang mandiri”. Dana transfer terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana transfer bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan memastikan pencapaian standar pelayanan publik minimum di seluruh wilayah, serta pengembangan demokrasi, keadilan, keadilan dan pemeliharaan yang harmonis antara pusat, regional dan inter-regional. Dana transfer terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK). Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep 1) Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal; 2) Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*; yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah; 3) *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh daerah.

Ada beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan keadilan antar wilayah (*geo-geographical equity*);
- b. Meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*);
- c. Meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif;
- d. Meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam Negeri yang ditetapkan APBN;
- 2) Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90 % dari dana alokasi umum yang ditetapkan di atas.

Dari dana alokasi umum untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah suatu daerah semakin rendah ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah pusat. Idealnya daerah berusaha untuk memperbesar PAD daerahnya agar dapat membiayai belanja daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah pengelolaannya merupakan kewenangan dari daerah, sehingga dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah akan membuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya menjadi lebih besar

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang juga akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari:

- a. Hasil pajak daerah yang terdiri dari dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor;
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
- 5) Pajak rokok.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel dan restoran;
- 2) Pajak hiburan;
- 3) Pajak Penerangan jalan;
- 4) Pajak mineral bukan logam dan bantuan;
- 5) Pajak parkir;
- 6) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- 7) Pajak sarang burung walet;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- a. Hasil retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis jasa yang menurut pertimbangan sosial ekonomi yang layak dijadikan sebagai obyek retribusi, jenis jasa tersebut antara lain jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu.
- b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti:
 - 1) Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 2) Penerimaan bunga deposito;
 - 3) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Penerimaan ganti rugi atas kehilangan atau kerugian kekayaan daerah;
 - 5) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 6) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - 7) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - 8) Pendapatan eksekusi atas jaminan;
 - 9) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar juga kewenangan pemerintah tersebut dalam melakukan kebijakannya. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat).

3. Belanja Modal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 “Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”. Belanja modal di gunakan untuk memperoleh aset

tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Halim (2012) menyatakan bahwa “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Penggolongan belanja modal dibagi menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal fisik lainnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dan satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk ang

garan belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Pengelolaan APBD yang produktif ditempuh dengan mengurangi belanja konsumtif, meningkatkan PAD dan memperbesar alokasi belanja modal untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketersediaan infrastruktur daerah melalui peningkatan alokasi belanja modal memberi iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi regional. Belanja infrastruktur pemerintah yang produktif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Kappeler, 2012). Perbaikan infrastruktur mendorong investasi publik. Infrastruktur daerah yang memadai akan menunjang aktifitas masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat produktifitas. Salah satu indikator belanja yang baik adalah semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah.

Ghozali (2012) menyatakan kategori belanja modal yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa jenis belanja modal, sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang dapat memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi sudah siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi sudah siap pakai.

5) Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya yaitu pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran menyatakan bahwa belanja modal dipergunakan untuk antara lain: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan,

belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal Badan Layanan Umum (BLU).

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja modal dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal. Sumber-sumber penerimaan daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-Lain pendapatan yang sah yaitu: Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Sedangkan Pembiayaan daerah bersumber dari: Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana cadangan daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengalokasian dana yang bersumber dari pendapatan dan pembiayaan daerah kepada belanja daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah sendiri atas kebutuhan belanja daerahnya. Pada umumnya sumber dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasional daerah dan sisanya dialokasikan untuk belanja daerah lainnya diantaranya belanja modal. DAU lebih banyak dialokasikan kepada belanja pegawai, dan sisanya dialokasikan kepada belanja-belanja daerah diantaranya Belanja Modal.

Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar adalah cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi, dimana penatausahaan keuangan daerah berarti adalah “peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Belanja termasuk Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya”. Mengacu pada pengertian belanja modal tersebut, selain pengadaan aset fisik yang dikuasai oleh pemerintah, sebenarnya terdapat beberapa belanja yang berkarakteristik sebagai belanja modal yang menghasilkan aset, tetapi tidak menjadi milik Pemerintah,

antara lain: 1. Biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan biaya. 2. jasa konsultan untuk kekayaan intelektual. 3. Biaya jasa profesi untuk capacity building. 4. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan nilai asset. 5. Biaya pengadaan aset yang diserahkan kepada masyarakat

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang cara berpikirnya menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh adanya fakta empiris. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	PAD (X_1) DAU (X_2) DBH (X_3)	Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dengan arahnegatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja

						modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal
2	Hidayah, Hurul (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah	DAU (X_1) DAK (X_2) PAD (X_3)	Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	Secara serentak variabel DAU, DAK, dan PAD berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Secara Parsial variabel DAU dan PAD, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Belanja Langsung.
3	Nuarisa, Sheila Ardhian 2013	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	PAD (X_1) DAU (X_2) DAK (X_3)	Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	1. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal. 2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal. 3. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap

						<p>pengalokasian belanja modal.</p> <p>4. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal, dengan koefisien determinasi 69,7% dan selebihnya 30,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.</p>
4	Irsyadi (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)	DAU (X_1) DAK (X_2), PAD (X_3), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (X_4)	Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal
5	Adyatma Erdi. (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.	DAU (X_1) DAK (X_2), PAD (X_3), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (X_4)	Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal.

						<p>Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal.</p>
--	--	--	--	--	--	---

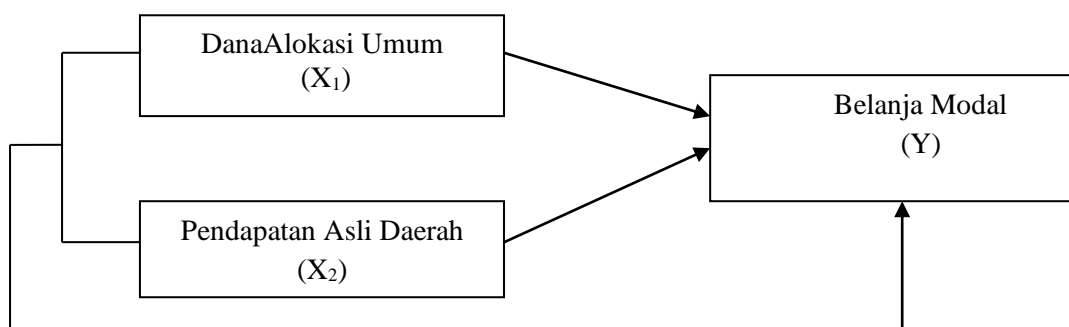
Sumber :Penulis (2019)

C. Kerangka Konseptual

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh dan menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional dalam sehari-hari suatu satuan kerja dan tidak dijual. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Hasil penelitian Irsyadi (2014) menunjukkan bahwa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Penelitian Susanti (2016) menyimpulkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

1. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum seperti membangun jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan sosial, dan

kepentingan umum lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat diduga bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wandira (2013) mengatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Terdapat hubungan yang positif antara PAD dengan belanja modal. Peningkatan PAD diharapkan akan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik juga akan mengalami peningkatan.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh PAD terhadap belanja modal sudah cukup banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Siswantoro (2012), Mauli Danayanti (2014) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), penelitian Darmayasa dan Suandi (2014)

menunjukkan hasil yang sebaliknya, dimana PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, bahkan penelitian yang dilakukan Jiwatami dan (2013) menemukan PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Peneliti merasa perlu untuk menguji kembali untuk mengetahui konsistensi penelitian pengalokasian belanja modal. Maka dapat di artikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran yang dilakukan pemerintah atas belanja modal akan semakin tinggi.

D. Hipotesis

Sugiyono (2012) menyatakan “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat pertanyaan”. Adapun hipotesis yang ditarik yaitu:

1. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
3. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
4. Terjadi *Flypaper Effect* di Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat eksplanasinya penelitian ini merupakan metode penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016)

Sugiyono (2016) menyatakan “Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat”. Hal ini berarti penelitian berfokus pada pengaruh penggunaan media gambar sebagai variabel independen terhadap hasil belajar sebagai variabel dependen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Maret 2019 sampai dengan tahun Juli 2019.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal penelitian berikut ini:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan															
		Maret 2019			April 2019			Mei 2019			Juni 2019			Juli 2019			
1	Risetawal/PengajuanJudul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■											
3	Seminar Proposal					■											
4	PerbaikanAcc Proposal						■	■									
5	Pengolahan Data								■	■							
6	Penyusunan Skripsi										■	■					
7	Bimbingan Skripsi												■	■	■		
8	Meja Hijau															■	■

Sumber : Penulis, 2019

C. Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel–variabel yang akan dioperasikan dalam penelitian ini adalah variabel yang terkandung hipotesis yang telah dirumuskan. Berikut definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Deskripsi	Skala
Dana Alokasi Umum	Transfer Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dengan APBN (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).	Rasio

Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 2. Retribusi 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang Sah <p>(Sumber: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)</p>	<p>Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(Sumber: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)</p>	Rasio
Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah 2. Peralatan dan mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Aset tetap lainnya yang menambah nilai aset tetap <p>(Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)</p>	<p>Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.</p> <p>(Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)</p>	Rasio

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, dengan fokus analisis pada Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, dengan data sekunder berbentuk *time series*

dari Tahun 2014-2018 sebanyak 33 Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara meliputi 25 kabupaten dan 8 kota.

2. Sampel

Arikunto (2013) menyatakan bahwa “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Sedangkan Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang harus bias mewakili populasi tersebut”. Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Sumatera Utara yang telah menyerahkan dan mempublikasikan LKPD yang sudah diaudit oleh BPK dari tahun 2014-2018.
- b. Belanja daerah tertinggi dan terendah di Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara dari Tahun 2014-2018.

Sehingga banyak unit pengamatan analisis adalah ($5 \times 15 = 75$ data) Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Daftar Populasi dan Sampel

No	Nama Pemerintah Daerah	Kriteria 1	Kriteria 2	Sampel
1	Kab. Asahan	√	√	Sampel 1
2	Kab. Dairi	√	√	Sampel 2
3	Kab. Deli Serdang	√	√	Sampel 3
4	Kab. Tanah Karo	√	X	Tidak
5	Kab. Labuhan Batu	√	X	Tidak

6	Kab. Langkat	√	√	Sampel 4
7	Kab. Mandailing Natal	√	√	Sampel 5
8	Kab. Nias	√	X	Tidak
9	Kab. Simalungun	√	√	Sampel 6
10	Kab. Tapanuli Selatan	√	√	Sampel 7
11	Kab. Tapanuli Tengah	√	X	Tidak
12	Kab. Tapanuli Utara	√	√	Sampel 8
13	Kab. Toba Samosir	√	√	Sampel 9
14	Kota Binjai	√	X	Tidak
15	Kota Medan	√	√	Sampel 10
16	Kota Pematang Siantar	√	√	Sampel 11
17	Kota Sibolga	√	√	Sampel 12
18	Kota Tanjung Balai	√	X	Tidak
19	Kota Tebing Tinggi	√	√	Sampel 13
20	Kota Padang Sidempuan	√	X	Tidak
21	Kab. Pakpak Barat	√	X	Tidak
22	Kab. Nias Selatan	√	X	Tidak
23	Kab. Humbang Hasundutan	√	√	Sampel 14
24	Kab. Serdang Bedagai	√	X	Tidak
25	Kab. Samosir	√	√	Sampel 15
26	Kab. Batu Bara	√	X	Tidak
27	Kab. Padang Lawas	√	X	Tidak
28	Kab. Padang Lawas Utara	√	X	Tidak
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	√	X	Tidak
30	Kab. Labuhanbatu Utara	√	X	Tidak
31	Kab. Nias Utara	√	X	Tidak
32	Kab. Nias Barat	√	X	Tidak
33	Kota Gunung Sitoli	√	X	Tidak

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/> (2019)

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2016) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan yang bersifat lisan maupun tulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi) yaitu suatu teknik pengumpulan data, dimana responden tidak mengetahui sedang dijadikan sumber data atau penelitian (responden pasif). Pengamatan terhadap rutinitas dilokasi penelitian, langsung terhadap objek yang diteliti;
2. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperoleh yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumen yang digunakan yaitu Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

G. Teknik Analisis Data

Adapun tehnik analisis yang digunakan adalah dengan teknis analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dapat dihitung dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* dengan rumus :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

BM (Y) = Belanja Modal (*Devendent Variable*)

DAU (X₁) = DAU (*Indevendent Variable*)

PAD (X_2)	=	PAD (<i>Indevendent Variable</i>)
b_1, b_2	=	Koefisien Regresi Linear Berganda (<i>Multiple Regrestion</i>)
a	=	Konstanta
e	=	Kesalahan Penduga (Variabel Pengganggu)

H. Pengujian Hipotesis

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dimaksud sebagai tuntunan dalam penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti adalah benar dan mencari jawaban sesungguhnya”. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dan uji F, dan koefisien Determinasi (R^2).

1. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variable independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variable terikat. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah:

$H_0 : \beta = 0$, maka PAD dan DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

$H_1 : \beta \neq 0$, maka PAD dan DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja

Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Kriteria pengujian:

$P \text{ Value (Sig)} > 0,05 = H_0$ (terima H_0 tolak H_1)

$P \text{ Value (Sig)} < 0,05 = H_1$ (terima H_1 tolak H_0)

2. Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variable dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

$H_0: \beta = 0$, maka DAU dan PAD secara simultan tidak berpengaruh terhadap
Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

$H_1: \beta \neq 0$, maka DAU dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap Belanja
Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Kriteriapengujian:

$P \text{ Value (Sig)} < 0,05 = H_0$ (terima H_0 tolak H_1)

$P \text{ Value (Sig)} > 0,05 = H_1$ (terima H_1 tolak H_0)

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara (0) dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variable dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Ghozali, 2013).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian,

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketentuan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

2. Deskripsi Variabel

Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian belanja modal (BM), pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

Tabel 4.1
Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota
Di Sumatera Utara Tahun 2014-2018

No	Pemerintahan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Asahan	1,037,634	1,143,614	1,388,136	1,241,829	1,501,955
2	Kab. Dairi	593,188	694,247	745,529	864,134	993,346
3	Kab. Deli Serdang	1,801,287	2,005,506	2,361,728	3,260,500	3,005,435
4	Kab. Langkat	1,329,229	1,536,812	1,605,301	1,615,158	2,287,200
5	Kab. Mandailing Natal	765,110	850,556	972,739	1,144,944	1,495,777
6	Kab. Simalungun	1,378,043	1,432,131	1,648,279	2,109,777	2,185,035
7	Kab. Tapanuli Selatan	676,128	842,846	862,248	1,093,721	1,176,894
8	Kab. Tapanuli Utara	737,700	1,668,769	816,538	1,003,988	1,251,194
9	Kab. Toba Samosir	619,897	770,736	770,865	805,673	1,010,632
10	Kota Medan	3,021,172	3,224,449	3,723,643	4,878,166	4,525,231
11	Kota Pematang Siantar	639,607	741,073	774,366	1,007,049	940,141
12	Kota Sibolga	414,041	450,894	521,086	642,489	689,678
13	Kota Tebing Tinggi	479,585	584,572	614,015	651,371	760,703
14	Kab. Humbang Hasundutan	511,538	605,790	700,845	754,044	881,820
15	Kab. Samosir	400,831	506,372	552,483	660,281	810,390

Pada tabel 4.1 di atas diketahui dari variabel belanja modal nilai minimum pada Kota Sibolga tahun 2014 sebesar 479,585 jutadan nilai maksimum pada Kota Medan Tahun 2017 sebesar 4,878,166 juta.

Tabel 4.2
Perkembangan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota
Di Sumatera Utara 2014-2018

No	Pemerintahan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Asahan	628,975	733,672	795,351	795,351	891,150
2	Kab. Dairi	451,176	512,477	532,723	560,602	623,702
3	Kab. Deli Serdang	1,100,014	1,260,755	1,363,811	1,500,192	1,494,821
4	Kab. Langkat	847,503	982,658	1,039,651	1,039,651	1,200,481
5	Kab. Mandailing Natal	541,107	625,543	692,134	722,942	788,477
6	Kab. Simalungun	865,406	977,809	1,077,986	1,425,601	1,230,816
7	Kab. Tapanuli Selatan	454,322	517,343	572,098	592,764	654,669
8	Kab. Tapanuli Utara	487,346	1,104,926	596,841	616,216	650,827
9	Kab. Toba Samosir	387,623	423,292	495,377	506,844	537,941
10	Kota Medan	1,153,789	1,270,245	1,393,505	1,528,725	1,611,941
11	Kota Pematang Siantar	429,632	492,115	519,436	536,792	593,533
12	Kota Sibolga	292,873	338,507	371,813	380,075	412,806
13	Kota Tebing Tinggi	307,636	368,587	385,030	400,237	432,437
14	Kab. Humbang Hasundutan	376,847	440,920	486,880	511,805	533,185
15	Kab. Samosir	331,413	384,761	441,619	447,471	459,550

Pada tabel 4.2 di atas diketahui dari variabel dana alokasi umum nilai minimum pada Kota Sibolga tahun 2014 sebesar 292,873 jutadan nilai maksimum pada Kota Medan Tahun 2018 sebesar 1,611,941 juta.

Tabel 4.3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Di Sumatera Utara 2014-2018

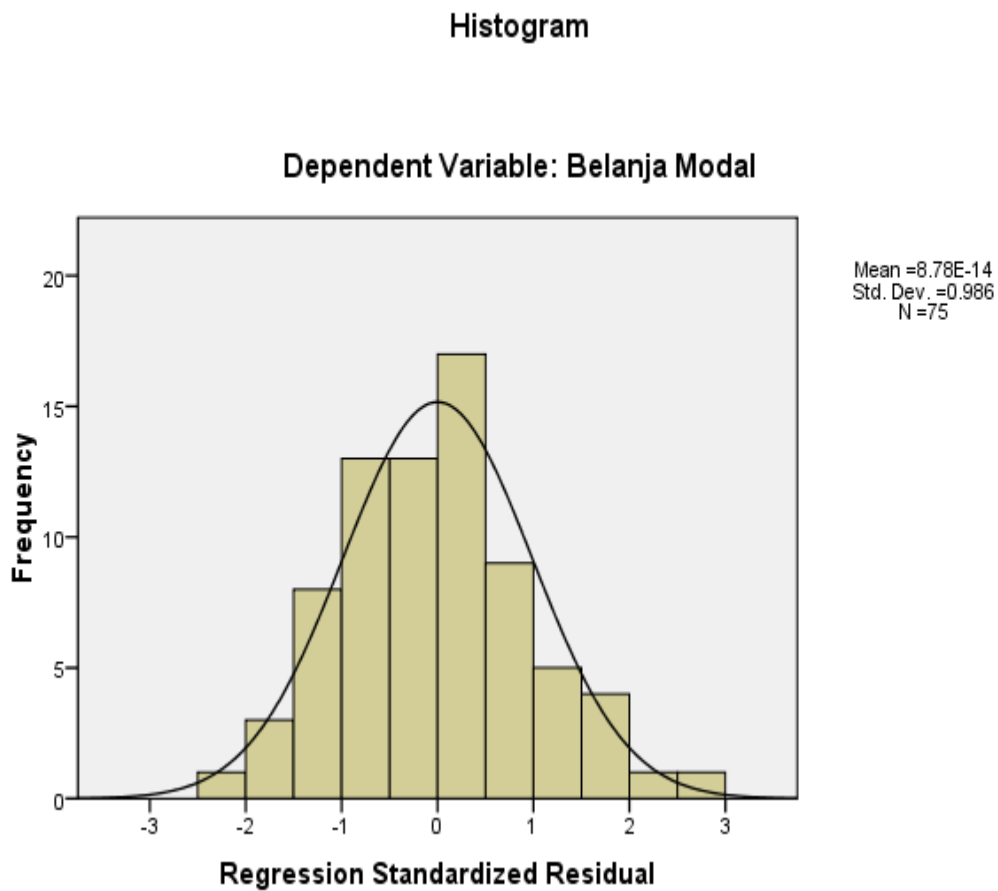
No	Pemerintahan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Asahan	37,895	53,692	91,468	98,279	52,170
2	Kab. Dairi	20,912	29,933	53,526	58,792	68,003
3	Kab. Deli Serdang	291,018	328,348	433,886	515,294	573,010
4	Kab. Langkat	129,243	65,521	107,812	122,715	132,673
5	Kab. Mandailing Natal	21,274	47,666	37,966	63,847	70,406
6	Kab. Simalungun	61,246	97,915	96,390	111,893	132,561
7	Kab. Tapanuli Selatan	56,418	69,220	95,588	109,349	76,641
8	Kab. Tapanuli Utara	34,023	75,909	63,696	82,754	94,783
9	Kab. Toba Samosir	16,543	19,803	26,014	30,953	54,391
10	Kota Medan	1,147,124	1,206,170	1,384,246	1,489,723	1,535,310
11	Kota Pematang Siantar	49,915	61,358	90,477	95,558	101,583
12	Kota Sibolga	26,698	29,458	52,923	60,487	68,538
13	Kota Tebing Tinggi	47,331	53,200	74,515	82,410	94,058
14	Kab. Humbang Hasundutan	17,902	17,633	29,491	35,238	42,097
15	Kab. Samosir	17,460	26,661	36,850	34,297	39,268

Pada tabel 4.3 di atas diketahui dari variabel pendapatan asli daerah nilai minimum pada Kota Sibolga tahun 2014 sebesar 26,698 jutadan nilai maksimum pada Kota Medan Tahun 2018 sebesar 1,535,310 juta

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji Normalitas data berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal, gunakan statistik parametrik dan jika data tidak normal gunakan statistik non parametrik atau lakukan *treatment* agar data normal. Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:

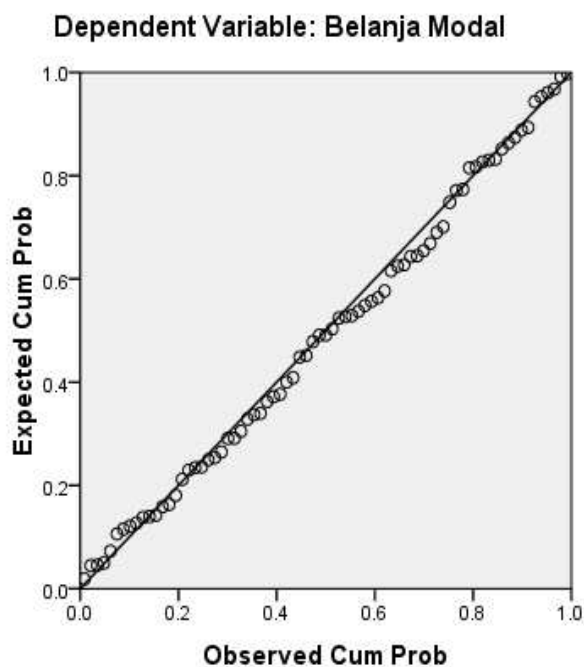


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk jumlah sampel kecil.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0(2019)

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal

“Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping menggunakan uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik”.

Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogoro Smirnov* (K-S).

Tabel 4.4
Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10423971
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z		.432
Asymp. Sig. (2-tailed)		.992

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Pada tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *sig Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,992. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.527	.442		-1.191	.238		
	DAU	.943	.044	.739	21.367	.000	.372	2.686
	PAD	.158	.019	.289	8.367	.000	.372	2.686

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,10$. Untuk variabel DAU memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,372 dan VIF

sebesar 2,686. Variabel PAD memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,372 dan VIF sebesar 2,686.

c. Uji Autokorelasi

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada uji *run test* lebih besar > dari 0,05.

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00238
Cases < Test Value	37
Cases >= Test Value	38
Total Cases	75
Number of Runs	35
Z	-.812
Asymp. Sig. (2-tailed)	.417

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,417 > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4. Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 4.7 Regresi Linier BergandaCoefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.527	.442		-1.191	.238		
	DAU	.943	.044	.739	21.367	.000	.372	2.686
	PAD	.158	.019	.289	8.367	.000	.372	2.686

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Tabel 4.7 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,527 + 0,739 X_1 + 0,289 X_2$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka nilai belanja modal(Y) adalah sebesar -0,527 juta.
- Jika terjadi peningkatan DAU sebesar 1 juta, maka belanja modal(Y) akan meningkat sebesar 0,739 juta.
- Jika terjadi peningkatan PAD sebesar 1 juta, maka belanja modal(Y) akan meningkat sebesar 0,289 juta.

5. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2012:98) Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat.

**Tabel 4.8 Uji Simultan
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.289	2	12.145	10.087	.000^a
	Residual	.804	72	.011		
	Total	25.093	74			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah $10,087 > F_{tabel3,12}$, dengan signifikansi 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu DAU (X_1) dan PAD (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.9 Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.527	.442		-1.191	.238		
	DAU	.943	.044	.739	21.367	.000	.372	2.686
	PAD	.158	.019	.289	8.367	.000	.372	2.686

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji statistik t di atas berikut ini:

- 1) Kemandirian DAU (X_1) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel DAU (X_1) diketahui bahwa $t_{hitung} 21,367 > t_{tabel} 1,993$ dan nilai signifikansi variabel DAU (X_1) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti DAU (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

- 2) PAD (X_2) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel PAD (X_2) diketahui bahwa $t_{hitung} 8,367 < t_{tabel} 1,993$ dan nilai signifikansi variabel PAD (X_2) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti PAD (X_2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel belanja daerah. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 ^a	.968	.967	.10568

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Dari tabel 4.10 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,967. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 96,7%, sedangkan sisanya sebesar 3,3% (100% - 96,7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis, seperti silfa, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Berdasarkan dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa DAU terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena *unconditional grants* merupakan bentuk transfer yang paling penting selain dana alokasi khusus. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dana transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat.

Hal tersebut dipandang wajar karena sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Undang-Undang No. 33/2004). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayah Hurul (2014), yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

2. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan

belanja daerah. Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD yang merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah. Target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah didasarkan pada potensi daerah dan realisasi PAD pada tahun sebelumnya. Sehingga semakin besar realisasi pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan pemerintah daerah melalui pengalokasian anggaran belanja modal untuk tahun selanjutnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hurul (2014), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswontoro (2012), Danayanti (2014), Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), penelitian Darmayasa dan Suandi (2014) menunjukkan hasil yang sebaliknya, dimana PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, bahkan penelitian yang dilakukan Jiwatami (2013) menemukan PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

3. Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Berdasarkan dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa DAU dan PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayah Hurul (2014), yang menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kemandirian dalam APBD sangat

terkait dengan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD yang merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah.

4. Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Modal

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,967. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 96,7%, sedangkan sisanya sebesar 3,3% (100% - 96,7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis, seperti silfa, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan lain-lain (Ghozali, 2013).

Berdasarkan dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa terbukti terjadinya *Flypaper Effect* pada belanja daerah, dimana DAU lebih besar dibandingkan PAD. Hal ini disebabkan bahwa *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (DAU) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Hal ini tentu sesuai asas desentralisasi dan prinsip otonomi di mana pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Hasil studi penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara, ditemukan fakta bahwa kapasitas fiskal daerah tidak memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap belanja daerah daripada pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja modal, pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara

belum mandiri dari segi keuangan karena belum mampu bertumpu pada kemampuan keuangan daerah itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang *flypaper effect* pada DAU dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
2. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
3. Hasil perhitungan uji R^2 ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 96,7%, sedangkan sisanya sebesar 3,3% (100% - 96,7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis, seperti silfa, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan lain-lain.
4. Terjadi *Flypaper Effect* di Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Dairi, Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Simalungun, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Kota Medan, Pematang Siantar, Sibolga, Dan Tebing Tinggi,

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah daerah bisa memanfaatkan sumber pendapatan daerah dengan efektif dan efisien sehingga cita-cita serta harapan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang disertai pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut dapat terwujud dengan baik, dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar membuat sampel daerah lainnya, khususnya di luar Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui daerah mana saja yang sudah mandiri maupun yang belum mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Teori Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Adyatma, Erdi. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi, Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Stiku Bank*.
- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59.
- Ardhani, Pungky. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)* Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Danayanti, Mauli. (2014). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Realisasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi*, Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Darmayasa, Suandi. (2014). *Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi. SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014: 1-24*
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, R. (2018). Pengaruh Kualitas produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Cepat saji Kfc Cabang Asia Mega Mas Medan. *JUMANT*, 7(1), 77-84.
- Hidayah, Nurul. (2014). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah*: Skripsi. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Irsyadi, Muh Adib. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Irawan, I., & Pramono, C. (2017). *Determinan Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*.
- Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). A Business Model Canvas: Traditional Restaurant “Melayu” in North Sumatra, Indonesia. *Bus. Manag. Strateg*, 7(2), 102-120.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. (2013). *Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Pada Kota/Kabupaten di Indonesia periode 2008 – 2012*. SNA XVI Manado, 25 – 28 September 2011.
- Kappeler, A & Olle Albert & Stephan, Andreas. (2012). *Does Fiscal Decentralization Foster Regional Investment In Productive Infrastructure*. *Deutsches Institute Fur Wirtschafts For Schung*.
- Kusnandar, Siswantoro, Dodik. (2012). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*: Banjarmasin.
- Kusumawardani, Ismawulan. (2018). *Pengaruh PAD, DAU, DAK, SILPA Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kholik, K. (2017). *The Effect Of Occupational Safety And Health On Work Productivity Of Employees And Its Impact On Employee Performance At Pt. Alfo Citra Abadi Medan*.
- Lestario, F. (2018). *Dampak Pertumbuhan Bisnis Franchise Waralaba Minimarket Terhadap Perkembangan Kedai Tradisional Di Kota Binjai*. *Jumant*, 7(1), 29-36.
- Mesra, B. (2018). *Factors That Influencing Households Income And Its Contribution On Family Income In Hampanan Perak Sub-District, Deli Serdang Regency, North*. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(10), 461-469.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Achmad Daengs, G. S., Sahat, S., Rosmawati, R., Kurniasih, N., ... & Rahim, R. (2018). *Decision support rating system with Analytical Hierarchy Process method*. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.3), 105-108.

- Panggabean, Fitri Yani & Dalimunthe, MB. (2017). *Analysis of Flypaper Effect on the District and Municipality Government Expenditures in North Sumatra Province. The 2nd International Conference on Accounting, Business & Economics.*
- Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rossanty, Y., & Putra Nasution, M. D. T. (2018). Information Search And Intentions To Purchase: The Role Of Country Of Origin Image, Product Knowledge, And Product Involvement. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 96(10).
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Siregar, N. (2018). Analisis Produk Dan Citra Koperasi Terhadap Wirausaha Koperasi Dalam Meningkatkan Industri Rumah Tangga Pada Masyarakat Desa Lubuk Saban Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang. *Jumant*, 9(1), 79-93.
- Setiawan, N., Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Tambunan, A. R. S., Girsang, M., Agus, R. T. A., ... & Nisa, K. (2018). Simple additive weighting as decision support system for determining employees salary. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.14), 309-313.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Yang Diperbaharui Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang “ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). *Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Wakhyuni, E. (2018). Kemampuan Masyarakat Dan Budaya Asing Dalam Mempertahankan Budaya Lokal Di Kecamatan Datuk Bandar. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 25-31.